



Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Chika Putri Aprilia¹, Tri Sulistyaningsih², Salahudin³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang – Jawa Timur 65144

ARTICLE INFO

Article history:

Received 08/02/2022

Received in revised form 02/03/2022

Accepted 13/05/2022

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problems and supporting factors of the implementation of the Covid-19 vaccination policy carried out by the East Kutai District Health Office in North Sangatta District. This research is important to do in order to enrich research on the implementation of the Covid-19 vaccination policy so that it can be used as a reference and comparison for further research. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to George Edward which states that there are four crucial variables in policy implementation. In this study using a descriptive approach with qualitative research methods. Sources of data used are secondary data and primary data taken from interviews with several respondents who are the people of North Sangatta District and also from the Health Office of East Kutai Regency, both interviews and data in other forms. The findings obtained are that people who carry out the second dose of vaccination tend to decrease for several reasons, one of which is that some people only follow the first vaccine as a condition for traveling outside the region. In general, the implementation of the Covid-19 vaccination in North Sangatta District itself has been carried out well according to the technical instructions for the Covid-19 vaccination implementation, but there are several things that still need to be improved so that the implementation of the Covid-19 vaccination in North Sangatta District is getting better. to the future.

Keywords: Implementation, Policy, Vaccination, Covid-19

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di Kecamatan Sangatta Utara. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memperkaya penelitian mengenai implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 agar menjadi bahan rujukan serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut George Edward yang menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dan data primer yang diambil dari wawancara beberapa responden yang merupakan masyarakat Kecamatan Sangatta Utara dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, baik wawancara maupun data dalam bentuk lainnya. Hasil temuan yang didapat yaitu masyarakat yang melakukan vaksinasi dosis kedua cenderung menurun karena beberapa hal, salah satunya yaitu sebagian masyarakat hanya mengikuti vaksin pertama sebagai syarat untuk berpergian keluar daerah. Secara umum, untuk implementasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara

sendiri sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar implementasi vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara semakin lebih baik untuk kedepannya.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Vaksinasi, Covid-19

*Penulis Korespondensi : Chika Putri Aprilia
E-mail : chikaputriaprilia8@gmail.com

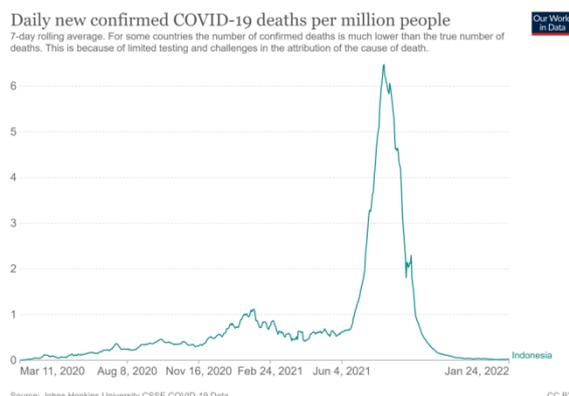
PENDAHULUAN

Sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini, *Coronavirus Disease 2019* atau dikenal dengan Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) ini telah menjadi perhatian serius bagi semua negara termasuk Indonesia. Hal ini karena virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok ini dapat mengancam kesehatan masyarakat serta telah menyebar begitu cepat ke berbagai negara hingga menimbulkan dampak buruk yang luar biasa, sehingga membuat banyak masyarakat menjadi resah karena takut terinfeksi virus ini. Selain itu, virus ini juga telah merenggut banyak jiwa karena penularannya yang sangat mudah, bisa dari manusia ke manusia lain bahkan ke hewan. Tidak hanya bagi kesehatan, virus Covid-19 ini juga menimbulkan dampak buruk di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pariwisata, dan lainnya. (Rahman, 2021) Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara satu dengan yang lainnya. Kemudian WHO mengumumkan Covid-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic karena penularannya yang sangat mudah dan mengakibatkan jumlah kasus

penularan yang terus meningkat dengan pesat, di samping itu wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global (Putri, 2020).

Gambar 1.

Data Masyarakat Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia dari Tanggal 11 Maret 2020 – 24 Januari 2022



(sumber : JHU CSSE COVID-19 DATA)

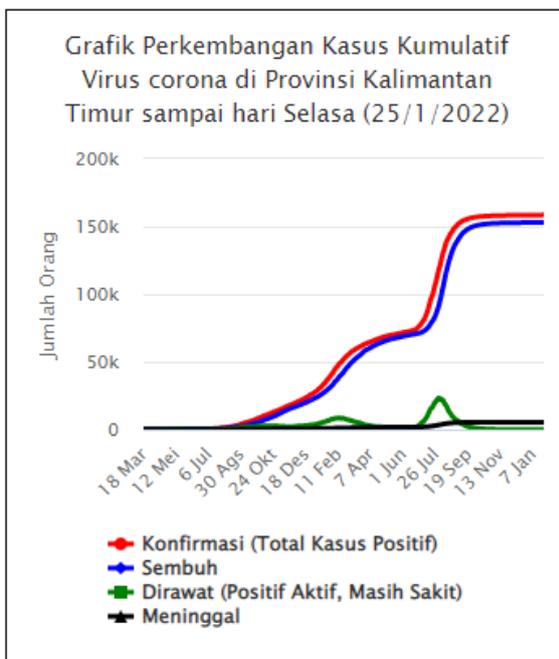
Berdasarkan grafik yang didapatkan pada *website 'Our World in Data'* dari JHU CSSE COVID-19 DATA yang selalu update setiap harinya mengenai masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di Dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2020 hingga 24 Januari 2022 totalnya sudah mencapai 4,29 jt kasus yang diakumulasikan dari pasien positif dirawat dan pasien positif sembuh sebanyak 4,12 jt kasus, sedangkan pasien yang meninggal dunia sebanyak 144 rb jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia memiliki angka kasus

yang cukup signifikan. Berdasarkan data tersebut maka semua pihak terkait, baik pemerintah ataupun masyarakat, semakin terdesak untuk segera mengambil tindakan dalam melakukan deteksi dini infeksi serta mencegah penyebaran Covid-19 terjadi guna menurunkan jumlah kasus Covid-19. (Yanti, Nugraha, Wisnawa, Agustina, & Diantari, 2020)

Kasus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia ini telah sampai hingga hampir di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, dan khususnya Kabupaten Kutai Timur. Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur sendiri dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.

Grafik Perkembangan Kasus Kumulatif Virus Corona di Provinsi Kalimantan Timur hingga Tanggal 25 Januari 2022



(sumber : kemkes.go.id, covid19.go.id, dan BNPB)

Dari gambar grafik di atas, berdasarkan data dari kemkes.go.id, covid19.go.id, dan BNPB, hingga

tanggal 25 Januari 2022, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 158.507 kasus, serta 5.459 orang meninggal, 90 orang masih dirawat (positif aktif), dan 152.958 orang dinyatakan sembuh. Untuk jumlah angka kasus positif sekaligus jumlah pasien meninggal terbanyak di Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan yaitu jumlah kasus positif sebanyak 37.879 orang dan meninggal sebanyak 1.863 orang. Sesuai dengan lokasi yang peneliti ambil yaitu Kabupaten Kutai Timur per-tanggal 25 Januari 2022 menduduki peringkat ketiga jumlah kasus pasien terkonfirmasi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebanyak 17.794 kasus terkonfirmasi, sembuh sebanyak 17.365 orang dan meninggal sebanyak 428 orang.

Situasi dari pandemic Covid-19 yang jumlahnya tidak kunjung menurun di dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah harus segera bertindak agar angka penularan akibat penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan dikendalikan. Dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama pandemic, pemerintah pun berupaya untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat terutama di tempat dan fasilitas umum dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (HK.01.07/MENKES/382/2020) tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum seperti menggunakan alat pelindung diri seperti masker, membersihkan tangan atau mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan antiseptic berbasis *alcohol/handsanitizer*. Menjaga jarak minimal 1 meter

dengan orang lain serta menghindari kerumunan serta keramaian, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Untuk menanggulangi serta menurunkan angka kasus akibat pandemi Covid-19 ini, selain wajib menjalankan protocol kesehatan juga perlu dilaksanakan upaya perlindungan khusus oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan program vaksinasi. (Nasir, Joyosemito, Boerman, & Ismaniah, 2021) hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266). Vaksinasi sendiri merupakan sebuah proses di dalam tubuh, di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. (Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika, 2021) Vaksinasi juga dinilai sebagai salah satu solusi dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Berbagai institusi riset di berbagai negara bergegas untuk mengembangkan varian vaksin dengan karakteristik dan efikasi

masing-masing. Indonesia sebagai negara yang terdampak Pandemi Covid-19 merespon dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi. (Veronica & Radhiah, 2021) Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan setidaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan publik yang berkaitan dengan wacana vaksinasi, salah satunya yaitu Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Rencana Vaksinasi Covid-19 massal di Indonesia menerangkan bahwa rencana vaksinasi yang akan dilakukan adalah langkah efektif dalam menanggulangi penularan penyakit. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan pada Presiden RI Joko Widodo. Program vaksinasi ini terlaksana setelah pada tanggal 11 Januari 2021, Badan POM mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat (EUA) untuk vaksin dan dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dari masyarakat agar turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Partisipasi masyarakat sendiri merupakan keikutsertaan dari masyarakat secara sukarela dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini karena program vaksinasi Covid-19 ini dibuat dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus Covid-19.

Namun dalam pelaksanaannya, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin Covid-19. Beberapa diantaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Meskipun demikian, kebijakan vaksinasi Covid-19 tetap harus berjalan agar dapat membantu memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sejalan dengan adanya program vaksinasi Covid-19 di seluruh Kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur di Kecamatan Sangatta Utara. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memperkaya penelitian mengenai implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 agar menjadi bahan rujukan serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam rangka mendukung serta mensukseskan implementasi kebijakan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Indonesia.

Penelitian yang mengkaji mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dan relevan dengan penelitian ini sudah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Fitriyana, Hamdi, & Akhmad (2021), Asyafin, Virdani, Kasih, & Arif (2021), Almanzani (2022), Nurlaiah (2021), Niken et al., (2021), Fitriani Pramita Gurning et al., (2021). Pada penelitian Fitriyana et al., (2021)

yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin", hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Pekapuran Raya sudah melakukan dengan sesuai Kebijakan Pemerintah untuk Pemberian Vaksin terhadap pengurangan kasus Covid-19 namun saja masih Kendala lainnya yang dihadapi yaitu keterbatasannya persediaan, dan pendistribusian vaksin Covid-19. Selain itu, kendala utama yang terjadi di daerah pekapuran raya itu terkhusus untuk para Lansia yang terhambat dengan bagaimana mereka pergi kelokasi vaksinasi dan juga masih banyak informasi yang mengatakan jika Lansia tidak boleh di vaskin karena dapat menyebabkan resiko yang berbahaya sehingga mengakibatkan tertunda dan bahkan tidak mendapatkan vaksin. Penelitian Asyafin et al., (2021) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya", hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya pada realitanya menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Surabaya, antara lain: realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan, keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya kepada petugas fasilitas Kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa

diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain. Penelitian Almanzani (2022) berjudul "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh", hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal ditandai dengan aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi belum efektif, aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana belum optimal, aspek SOP pada struktur birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID-19, insentif petugas vaksinasi COVID-19 yang belum memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin, aplikasi dan jaringan yang bermasalah, dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tidak sesuai dengan SOP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, hasil dan temuan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya pun juga berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian dan teori yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teori implementasi menurut George Edward.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan dengan menggunakan metode observasi untuk mencari data di lapangan. Penelitian ini dilakukan selama peneliti melakukan magang riset selama 3 bulan (Agustus-November 2021) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Proses pelaksanaan penelitian kualitatif ini secara garis besar tahapan penelitiannya dapat merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data dilapangan, menganalisis data, dan merumuskan hasil studi. Sumber data yang digunakan adalah berasal dari data sekunder dan data primer. Data diambil dari wawancara responden yang merupakan masyarakat Kecamatan Sangatta Utara. Selain itu, data juga diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur baik dalam wawancara maupun data dalam bentuk lainnya. Model analisis data yang digunakan yaitu model Miles-Huberman, dikutip oleh Saldana (Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, 2014) yang meliputi: data di kondensasi (condensation data), penyajian data (display data), dan ditarik kesimpulan (drawing conclusions). (Asyafin et al., 2021)

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward, Menurut (George Edward INI, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka implementasi yang menjadi tujuan kebijakan publik

tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan kebijakan pun tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap, dan stroktur birokrasi (Edward III, 1980:1), (Abdal, 2015).

HASIL ANALISIS

Paparan Data

Upaya dari pemerintah mengenai kewajiban menjalankan protocol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dirasa masih kurang cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam penerapan protocol kesehatan tersebut. Maka dari itu diperlukan intervensi lain yang efektif untuk membantu memutus rantai penularan Covid-19 ini melalui upaya vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). Dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan

kelompok di masyarakat (*herd imunity*), dan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif agar mutu pelayanan dan cakupan vaksinasi Covid-19 meningkat dan merata. Proses penyusunan perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19 dilakukan di masing - masing administrasi pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan kegiatan pelayanan vaksinasi dapat berjalan dengan baik.

Data Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur 2021

Selama tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur tentunya memiliki target sasaran peserta vaksinasi Covid-19 hingga data capaian peserta vaksinasi Covid-19 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Untuk jenis vaksin yang terdata dalam tabel di bawah ini ada 5 jenis yaitu: CoronaVac (Sinovac), Astra Zeneca, Moderna, Sinopharm, dan Pfizer. Data target sasaran hingga data capaian peserta vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada **Tabel 5.1** yang terlampir di bawah ini:

Tabel 5.1.

Data Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis 1,2 dan 3 di Kab. Kutai Timur Selama Tahun 2021

KECAMATAN	SASARAN	DOSES 1	DOSES 2	DOSES 3
SANGGAT UTARA	95.572	67.462 (70,65%)	98.092 (102,64%)	1.622 (1,69%)
SANGGAT SELATAN	20.447	9.366 (45,81%)	8.779 (42,93%)	93 (0,45%)
TELUK PANDAN	7.147	5.966 (83,48%)	4.211 (58,93%)	62 (0,86%)
KANTAU PELINDU	11.038	2.274 (20,59%)	2.773 (25,11%)	29 (0,26%)
BENGALOH	32.611	27.298 (83,71%)	22.817 (70,00%)	181 (0,55%)
KALIRANG	11.397	16.491 (144,78%)	1.338 (11,74%)	81 (0,71%)
KALIBUN	11.789	16.366 (138,88%)	4.349 (37,17%)	66 (0,56%)
SANGKULIRANG	16.862	19.622 (116,37%)	16.798 (99,62%)	197 (1,17%)
KARANGAN	10.770	8.893 (82,66%)	4.862 (45,24%)	26 (0,24%)
SANDARAN	9.621	8.929 (92,81%)	2.677 (27,82%)	39 (0,40%)
MEARA WAHAI	32.044	27.318 (85,56%)	16.786 (52,42%)	196 (0,61%)
KOMBONG	22.961	17.088 (74,59%)	6.339 (27,83%)	56 (0,24%)
TELEN	8.257	7.392 (89,52%)	3.773 (45,81%)	37 (0,45%)
MEARA ANCALONG	11.961	6.346 (53,48%)	2.064 (17,26%)	96 (0,80%)
MEARA BENGKAL	10.931	7.888 (72,16%)	2.671 (24,43%)	81 (0,74%)
BATU AMPAR	6.262	4.921 (78,58%)	2.649 (42,30%)	39 (0,62%)
LONG MESANGAT	4.809	3.786 (78,73%)	2.198 (45,73%)	37 (0,77%)
BURANG	4711	3.852 (81,76%)	2.338 (49,84%)	33 (0,70%)
TOTAL	333.961	252.869 (75,72%)	167.197 (49,80%)	2.861 (0,85%)

Berdasarkan **Tabel 5.1** yang berisi data capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur pada dosis pertama, kedua dan ketiga,

untuk wilayah Kecamatan Sangatta Utara sendiri sudah mencakup warga Sangatta Utara dan Sangatta Selatan karena lokasinya yang cukup dekat sehingga seringkali masyarakat Kecamatan Sangatta Selatan terinput di wilayah Kecamatan Sangatta Utara ketika vaksinasi begitupun sebaliknya, sehingga data kedua Kecamatan tersebut pun masih saling mencakup.

Pada **Tabel 5.1** tersebut terdapat jumlah target sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang totalnya mencapai 333.961 jiwa, namun untuk capaiannya hanya sekitar 252.869 jiwa atau sekitar 75.72%.

Pada **Tabel 5.1** tersebut juga terdapat data capaian Dosis 2 yang mengalami penurunan jumlah capaian cukup signifikan yaitu sekitar 167.107 (50.04%) saja. Khusus untuk vaksinasi Dosis 3 atau *booster* ini memang memiliki angka yang sedikit yaitu 2.561 jiwa karena pada tahun 2021 vaksin dosis ketiga hanya dikhususkan untuk Tenaga Kesehatan seperti Perawat, Dokter, Bidan, Pegawai Dinas Kesehatan dan lainnya yang memiliki riwayat pemberian vaksin dosis 1 & 2 dengan jenis vaksin CoronaVac (Sinovac). Meskipun capaian vaksinasi belum memenuhi target sasaran, tetapi angka ini sudah cukup baik karena presentase masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang telah tervaksin sudah lebih dari 70% di tahun 2021, untuk sisanya akan dilanjut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022.

Untuk sumber data capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur ini berasal dari seluruh web Pcare atau Primary Care Vaksinasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur yaitu Pcare Puskesmas, Pcare LANAL, Pcare POLRES, Pcare KODIM, dan Pcare Pelaksana Vaksin

Gotong Royong (Kimia Farma, RS PKT, Klinik Swakarsa, Klinik Pratama KPC dan RS Medika). Pcare atau Primary Care Vaksinasi sendiri merupakan sebuah aplikasi *website* milik BPJS Kesehatan yang digunakan untuk pendataan, registrasi, skrining, verifikasi sasaran, serta pencatatan vaksinasi Covid-19. Selain itu, penentuan lokasi, jadwal pelayanan, alokasi, dan monitoring logistik vaksin juga dapat dipantau dengan aplikasi PCare Vaksinasi.

Berikut ini merupakan data cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kecamatan Sangatta Utara Selama Tahun 2021 yang dapat dilihat pada **Tabel 5.4** di bawah ini:

Tabel 5.4

Data Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kecamatan Sangatta Utara Selama Tahun 2021

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA				
HOTLINE VAKSINASI KAB. KUTAI TIMUR 081-4962-4326				
CAKUPAN VAKSINASI COVID 19 UPT PUSKESMAS SANGATTA UTARA				
"Per Tanggal 31 Desember 2021"				
CAKUPAN VAKSINASI	SASARAN VAKSINASI	CAPAIAN DOSIS KE 1	CAPAIAN DOSIS KE 2	CAPAIAN DOSIS KE 3
CAKUPAN VAKSINASI KOMULATIF	42775	27053 (63%)	20339 (47%)	542 (1,27%)
CAKUPAN VAKSINASI PETUGAS PUBLIK	8741	5988 (69%)	4690 (54%)	
CAKUPAN VAKSINASI SDMK	325	330 (102%)	279 (86%)	542 (167%)
CAKUPAN VAKSINASI MASYARAKAT RENTAN	1470	1858 (126%)	1165 (79%)	
CAKUPAN VAKSINASI LANSIA	1676	716 (43%)	574 (34%)	
CAKUPAN VAKSINASI MASYARAKAT UMUM	24914	12138 (49%)	10499 (42%)	
CAKUPAN VAKSINASI REMAJA	5649	6023 (107%)	3132 (55%)	

ipkmsangattautara@gmail.com
[puskesmas_sangatta_utara](https://www.instagram.com/puskesmas_sangatta_utara)
[puskesmasangattautara](https://www.facebook.com/puskesmasangattautara)

Pembahasan Teori Implementasi Kebijakan

Berdasarkan teori George Edward mengenai implementasi kebijakan, ada empat *variable* rusial dalam implementasi, yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat *variable* ini beroperasi secara simultan dan saling

berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berikut analisis hasil kegiatan atau pembahasan berdasarkan teori George Edward akan dijelaskan di bawah ini:

A. Komunikasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melakukan kerja sama dengan instansi lainnya seperti badan usaha milik swasta seperti beberapa perusahaan tambang batu bara, kelapa sawit dan lainnya yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, organisasi profesi/ kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian/lembaga atau pihak terkait lainnya yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini upaya kerja sama yang dilakukan meliputi: 1) Dukungan penyediaan tenaga kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Kutai Timur; 2) Tempat vaksinasi Covid-19 seperti di gedung serba guna, tempat umum dan lainnya; 3) Keamanan seperti dari TNI-POLRI, SATPOL-PP dan Dinas Perhubungan; 4) Sosialisasi dan penggerakan masyarakat; 5) Dukungan penyediaan tenaga non kesehatan; dan 6) Pengelolaan limbah medis.

Untuk kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara ini telah dilakukan sosialisasi kepada petugas dan fasilitas pelayanan, namun masih kurang sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun menggunakan media sosial sehingga pada tahap awal vaksinasi ini masyarakat masih belum begitu mengetahui mengenai pelaksanaan serta informasi mengenai vaksinasi Covid-19. Masyarakat mengetahui informasi mengenai vaksinasi Covid-19 ini kebanyakan dari televisi

ataupun media sosial serta kebijakan pemerintah mengenai kewajiban masyarakat menggunakan sertifikat vaksin ketika berpergian, masuk ke tempat hiburan umum maupun lainnya.

Meskipun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur maupun puskesmas setempat pada awalnya tidak begitu memberikan informasi atau sosialisasi mengenai vaksinasi Covid-19, namun antusias peserta vaksinasi Covid-19 setiap harinya tetap saja dapat memenuhi jumlah sasaran yang telah ditetapkan setiap harinya, terlebih pada pertengahan hingga akhir tahun 2021.

B. Sumber daya

a) Sumberdaya Manusia

Agar kerja sama dapat terlaksana dengan efektif, dibutuhkan Tim Pelaksana mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas. Tim ini harus melibatkan seluruh lintas program di lingkungan sektor kesehatan serta lintas sektor terkait. Tim Pelaksana setidaknya terdiri dari 5 bidang yaitu Bidang Perencanaan; Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana; Bidang Pelaksanaan; Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Bidang Monitoring dan Evaluasi. Untuk tim pelaksana vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sendiri dirasa sudah cukup personil karena semua tugas tim pelaksana sudah terlaksana dengan baik, seperti bidang logistic dan sarana prasarana yang telah mengupayakan ketersediaan logistic dan sarana prasarana yang cukup memadai seperti vaksin, komputer/laptop untuk input data, APD dan lainnya untuk melakukan vaksinasi di Kecamatan Sangatta Utara. Sedangkan tim vaksinasi yang terdiri dari beberapa bagian seperti

pendaftaran, screening, vaksinator dan observasi hingga keamanan juga sudah cukup personil karena dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh tenaga kesehatan dari beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, selain itu untuk keamanan juga dibantu oleh tenaga dari TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan untuk menjaga agar situasi di lokasi vaksinasi tetap kondusif.

b) Sumberdaya Anggaran

Sumber daya anggaran pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 program bersumber dari APBN (Dekonsentrasi, DAK non fisik/BOK), APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dibiayai oleh APBN, APBD dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: biaya operasional, biaya distribusi vaksin dan logistik, biaya pengembangan dan penyebarluasan materi KIE, biaya penyelenggaraan pertemuan advokasi, koordinasi dan sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring, dan surveilans KIPI. Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021 tidak mengalami kendala sedikitpun, untuk anggaran vaksinasi Covid-19 sendiri menghabiskan dana sekitar Rp17.000.000.000,-

c) Sumberdaya Peralatan

Untuk sumberdaya peralatan seperti fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan

Sangatta Utara secara umum sudah memadai. Vaksinasi yang pada awalnya hanya dilaksanakan di lokasi vaksin massal yang telah ditentukan seperti Gedung Serba Guna dan BPU kini juga dilaksanakan di UPTD Puskesmas, tempat umum seperti tempat hiburan yang telah ditentukan, dan juga vaksin *on the road* di beberapa RT. TNI dan POLRI seperti LANAL Sangatta, Polres Kutim dan Koramil 0909-01/SGT pun juga turut andil dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 karena menyediakan vaksinasi di lokasi yang telah ditentukan. Bahkan beberapa perusahaan swasta terlebih perusahaan batu bara yang ada di wilayah Kecamatan Sangatta Utara juga turut serta dalam percepatan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 ini seperti mengadakan vaksinasi gotong royong bagi karyawan dan keluarga karyawan, sehingga masyarakat saat ini dapat lebih mudah untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Selain lokasi, ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di wilayah Kecamatan Sangatta Utara juga dirasa sudah cukup memadai seperti alat tensimeter, thermogun, laptop/computer, printer, alat perlindungan diri (APD), masker, handscoon, dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

d) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya kewenangan pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kecamatan Sangatta Utara telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan karena pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur telah melakukannya sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan, dengan dibantu oleh pemerintah daerah atau Bupati Kabupaten Kutai Timur.

C. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengemukakan: "kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif" (Budi Winarno, 2014). Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi perhatian, menyangkut tentang disposisi dalam implementasi kebijakan, yaitu :

a) Pengangkatan Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 ini tentunya tersusun tatanan struktur birokrasi untuk menjalankan tugas-tugasnya agar implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 ini berjalan secara teratur. Karena keterbatasan jumlah tim pelaksana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam bidang-bidang yang telah disebutkan sebelumnya sehingga hampir semua personil Bidang pengendalian dan Pemberantasan penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ikut andil atau turun tangan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara.

b) Insentif

Insentif sendiri merupakan bentuk kompensasi kepada tim pelaksana atau tim vaksinasi Covid-19 untuk mendorong atau merangsang para personil dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Insentif yang diberikan kepada para tenaga pelaksana vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur sendiri sudah termasuk dalam sumberdaya anggaran

vaksinasi Covid-19 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Untuk alokasi dana insentif tersebut sudah cukup baik karena insentif tersebut diberikan berdasarkan laporan Surat Perintah Tugas (SPT) harian yang diberikan masing-masing instansi dari personil tim vaksinasi Covid-19.

D. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, struktur birokrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.

Kemudian pelaksanaan vaksinasi program di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati. Dinas Kesehatan kabupaten Kutai Timur kemudian melanjutkan-nya ke 21 UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kutai Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga melakukan kerja sama dengan instansi seperti Rumah Sakit swasta, badan usaha swasta seperti perusahaan-perusahaan tambang batu bara atau kelapa sawit, TNI-Polres Kutim, dan lembaga atau pihak terkait lainnya hingga terbentuk tugas pokok, wewenang dan fungsi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

a) *Standart Operational Procedure (SOP)*

Dalam pelaksanaannya, vaksinasi Covid-19 tentunya sudah memiliki

SOP yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19, sistem, sumber daya, tugas dan fungsi, tanggung jawab dan kebutuhan lainnya yang menyangkut vaksinasi Covid-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini telah menerapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai panduan dan SOP dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19, sehingga mekanisme dan pelaksanaannya sudah teratur dan memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Fragmentasi

Mengingat wilayah Kecamatan Sangatta Utara yang cukup luas dan jumlah sasaran penerima vaksinasi Covid-19 ditargetkan sebanyak 95.572 jiwa. Maka hal ini merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan kepada beberapa instansi berbeda yang juga ikut serta dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga diperlukan koordinasi yang cukup baik dan intensif agar kebijakan vaksinasi Covid-19 dapat terlaksana dengan baik di Kecamatan Sangatta Utara.

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara tentunya memiliki beberapa kendala yang terjadi, berdasarkan observasi dan wawancara peneliti kepada pihak pelaksana vaksinasi Covid-19 seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Puskesmas setempat, dan masyarakat sekitar, selama melakukan penelitian di lokasi vaksinasi Covid-19, ada beberapa hal yang peneliti temui terkait hal-hal yang menjadi faktor penghambat dari implementasi

kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara, seperti; 1) Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19, 2) Masih banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai pentingnya mendapatkan vaksin Covid-19, sehingga belum memiliki kesadaran untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, 2) Masih banyak masyarakat yang malas mengantri untuk mendapatkan vaksin Covid-19, 3) Masih banyak masyarakat yang hanya melakukan vaksinasi dosis pertama saja karena sebagai syarat untuk melakukan perjalanan keluar daerah sehingga tidak melakukan vaksinasi dosis kedua, 4) Jika setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama masyarakat mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) gejala sedang hingga berat seperti demam, meriang, batuk, dan lainnya, masyarakat cenderung takut untuk melakukan vaksin dosis kedua karena takut mengalami KIPI untuk kedua kalinya, 5) Masih banyak data peserta vaksin atau masyarakat yang belum update di Dispendukcapil atau kurang lengkap sehingga tidak terinput kedalam sistem Pcare Vaksinasi.

KESIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara sendiri sudah terlaksana dengan baik serta sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki karena pada hasil capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur sendiri mengalami penurunan jumlah masyarakat yang cukup signifikan untuk vaksin dosis 2, karena pada vaksin dosis 1 jumlah masyarakat yang tervaksin mencapai 252.869 (75.72%) sedangkan pada

vaksin dosis 2 masyarakat yang tervaksin hanya sekitar 167.107 (50.04%) saja. Belum terpenuhinya target sasaran masyarakat ini memiliki beberapa penyebab diantaranya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19, dan juga sebagian masyarakat yang hanya melakukan vaksinasi dosis 1 saja sebagai syarat untuk melakukan perjalanan keluar daerah sehingga tidak melanjutkan vaksinasi ke tahap selanjutnya yaitu dosis 2.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti memiliki saran agar pemerintah dapat semakin gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan vaksinasi Covid-19.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yang telah memberikan izin dalam penelitian ini
2. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini.
3. Tim vaksinasi Covid-19 Kabupaten Kutai Timur yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Leo Agustino. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta.
- KemendesRI. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri*. Kementerian Kesehatan

RI, 9, 22–50.

Budi Winarno. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. YOGYAKARTA: Media Pressindo.

Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. 37,57. Retrieved from <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>

Almanzani, N. N. (2022). *No IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH* Title. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 7 No.*

Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>

Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43–50. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>

Fitriyana, Hamdi, A. N., & Akhmad, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. *Universitas Islam Kalimantan*, 1–12.

Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: United Kingdom.

- Nasir, N. M., Joyosemito, I. S., Boerman, B., & Ismaniah. (2021). Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia. *Jurnal ABDIMAS*, 4(2), 191–204.
- Niken, N., Mia, P., Septiana, S., Reyhan, R., Argha, A., & Putra, P. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali. *Jurnal Health Sains*, 2(11), 2138–2144. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.343>
- Nurlaiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68. Retrieved from <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1135>
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Veronica, N. F., & Radhiah, K. I. (2021). Implementasi Kebijakan Kesehatan Dalam Perspektif Publik Di Kabupaten Kartanegara. *Ahmad Dahlan*, 1(1900029202), 1–10.
- Yanti, N. P. E. D., Nugraha, I. M. A. D. P., Wisnawa, G. A., Agustina, N. P. D., & Diantari, N. P. A. (2020). Public Knowledge about Covid-19 and Public Behavior During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(4), 491. <https://doi.org/10.26714/jkj.8.4.2020.491-504>